

**KINERJA PEJABAT FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA DALAM PELAKSANAAN
PATROLI SIAGA KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Lorensius Blesdova

NPP 31.0176

Asdaf Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau

Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik

Email: lorensiusbiessdova2107@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. H. Busiri S.Pdi, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement / Background (GAP): The Tanjungpinang City Civil Police Unit has the duty and function to maintain public order and public peace and enforce Regional Regulations in Tanjungpinang City. One of the activities carried out by the Tanjungpinang City Pamong Praja Police Unit in fulfilling its duties and functions is the Public Order and Public Peace Patrol carried out by the Pamong Praja Police Functional Officer. **Purpose:** The purpose of this study is to find out and analyze the performance, inhibiting factors, and efforts made by the Functional Officer of the Pamong Praja Police in the Implementation of Public Order and Public Order Alert Patrols at the Pamong Praja Police Unit of Tanjungpinang City. **Method:** The research method used is descriptive qualitative research and with data collection techniques using interviews, observations, and documentation. **Result:** From the research conducted by the author, it can be explained that the performance of the Pamong Praja Police Functional Officer in the Implementation of Public Order and Public Order Alert Patrols at the Tanjungpinang City Pamong Praja Police Unit has been good. The inhibiting factor in the implementation of the Public Order and Public Order Alert Patrol is the lack of personnel and the efforts made by the Tanjungpinang City Civil Service Police Unit are trying to increase the number of Functional Officers of the Pamong Praja Police. **Conclusion:** Based on the results of the research that the author has carried out at the Tanjungpinang City Pamong Praja Police Unit, it can be concluded that the Performance of the Pamong Praja Police Functional Officer in the Implementation of Public Order and Public Order Alert Patrols at the Tanjungpinang City Pamong Praja Police Unit can be assessed based on the achievement of work results in terms of quality, quantity, implementation of duties and work responsibilities. So far, the quality of the functional officials of the civil police has been in accordance with the rules and shows readiness in providing services. Then the functional officials of the civil police have also carried out their duties on standby. In carrying out their duties, the functional officials of the civil police have carried out their duties well in accordance with the reports received. And the functional officials of the civil police are responsible for their work in accordance with the rules in fulfill the duties. **Keywords:** Performance, Pamong Praja Police Unit, Functional Officer

ABSTRAK

Permasalahan / Latar Belakang (GAP): Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang memiliki tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah di Kota Tanjungpinang. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang dalam memenuhi tugas dan fungsinya adalah Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja, factor penghambat, dan upaya yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja dalam Pelaksanaan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara,, observasi, dan dokumentasi. **Hasil / Temuan:** Dari penelitian yang penulis lakukan dapat dijelaskan bahwa kinerja Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja dalam Pelaksanaan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang sudah baik. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah jumlah personel yang masih kurang dan upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang adalah mengusahakan adanya penambahan jumlah Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang dapat ditarik kesimpulan bahwa Kinerja Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja dalam Pelaksanaan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang dapat dinilai berdasarkan pencapaian hasil kerja secara kualitas, kuantitas, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kerja. Se jauh ini kualitas dari pejabat fungsional polisi pamong praja sudah sesuai dengan aturan dan menunjukkan kesiapan dalam memberi pelayanan. Kemudian para pejabat fungsional polisi pamong praja juga sudah melaksanakan tugasnya dengan siap siaga. Dalam pelaksanaan tugas, para pejabat fungsional polisi pamong praja sudah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan laporan yang diterima. Dan para pejabat fungsional polisi pamong praja bertanggung jawab akan pekerjaannya sesuai dengan aturan dalam melaksanakan tugas.

Kata Kunci: Kinerja, Satuan Polisi Pamong Praja, Pejabat Fungsional

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Tanjungpinang adalah ibukota Provinsi Kepulauan Riau. Kota ini memiliki keberagaman suku, agama dan budaya yang hidup berdampingan dalam budaya dan adat istiadat melayu. Hal ini yang menjadi ciri khas dan merupakan daya tarik tersendiri bagi Kota Tanjungpinang. Dengan komposisi penduduknya yang beragam maka perlu diselenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat agar kehidupan berjalan dengan lancar tanpa adanya konflik yang berarti. Memberikan perlindungan kepada masyarakat merupakan salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Fungsi dari perlindungan kepada masyarakat yaitu upaya pemerintah untuk memberi perlindungan kepada masyarakat sehingga tercipta ketertiban, rasa tenteram, dan rasa aman pada masyarakat. Dalam melaksanakan hal tersebut, Pemerintah Kota Tanjungpinang dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang.

Dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja memerlukan Sumber Daya Manusia yang memiliki kinerja yang baik dimana menurut Moeheriono, Kinerja merupakan sebuah penggambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan dalam suatu perencanaan strategis suatu organisasi. Kinerja sangat di perlukan dalam indikator di dalam Sumber Daya Manusia untuk mencapai tujuan yang telah di targetkan (Moeheriono, 2012). Sebagaimana Program Studi Penulis adalah Manajemen Sumber Daya Manusia maka penulis menganalisis dari sudut pandang tersebut. Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat (Hasibuan, 2014). Pandangan lain mengenai makna manajemen sumber daya manusia yang dipaparkan oleh Soedarmayanti (2016:37), Manajemen sumber daya manusia (MSDM) adalah kebijakan dan praktik menentukan aspek “manusia” atau sumber daya manusia dari posisi manajemen, termasuk merekrut, menyaring, melatih, penghargaan dan penilaian (Soedarmayanti, 2016). Sumber Daya Manusia di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang yang berkontribusi langsung dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah pejabat fungsional Polisi Pamong Praja sebab mereka yang melaksanakan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dilaksanakan oleh delapan regu patroli yang ada sebanyak enam kali dalam satu hari. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ketertiban dan ketenteraman masyarakat harus terus dijaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jumlah pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang masih kurang bila dibandingkan dengan ukuran dan karakteristik Kota Tanjungpinang. Dengan adanya kekurangan jumlah pegawai maka terdapat kendala dalam pelaksanaan Patrol Siaga Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat yang jumlahnya belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah melaksanakan sembilan kali patroli dalam satu hari sedangkan pelaksanaannya baru enam kali dalam satu hari. Hal inilah yang menjadi kesenjangan yang mendasari dilaksanakannya penelitian ini.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, Penelitian oleh Linawati, Rahmat Hidayat, dan Titi Chandrawati yang berjudul *Kinerja Satpol PP dalam Tugas dan Fungsi Sebagai Penegak Peraturan Daerah di Kabupaten Tana Tidung* (Lina, Hidayat, & Chandrawati, 2023), menemukan bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Penegak Peraturan Daerah di Kabupaten Tidung sudah cukup baik dilihat dari indikator kemampuan dan motivasi kerja. Penelitian oleh Dewo Septian, Wahidin Septa Zahran, dan Renisya Ayu Utami yang berjudul *Analisis Kinerja Anggota Satpol PP Kota Bekasi Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Bekasi* (Septian, Zahran, & Utami, 2023), menemukan bahwa Kinerja Anggota Satpol PP Kota Bekasi dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Bekasi sudah sesuai dengan Indikator Kinerja Anwar Prabu Mangkunegara yaitu kualitas kinerja, kuantitas kinerja, tanggung jawab, kerjasama, dan Inisiatif. Penelitian oleh Yulia, Ike Rachmawati, dan Andi Mulyadi yang berjudul *Kinerja Satpol PP Dalam Upaya Mewujudkan*

Ketertiban Umum Di Kota Sukabumi (Yulia, Rachmawati, & Mulyadi, 2019) menemukan bahwa Kinerja Satpol PP dalam upaya mewujudkan ketertiban umum di Kota Sukabumi masih sangat jauh dari keberhasilan karena tujuan dari Satpol PP dalam upaya mewujudkan ketertiban umum di Kota Sukabumi dalam menangani pelajar yang membolos belum mencapai target. Penelitian oleh Nofianto Pasang, Fatmawada, Hermanu Irawan, dan Dahlan yang berjudul *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima* (Pasang, Fatmawada, Irawan, & Dahlan, 2024) menemukan bahwa Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Pasar Inpres Distrik Kota Kabupaten Biak Numfor berdasarkan indikator produktivitas, kualitas layanan, responsivitas belum optimal sedangkan untuk indikator akuntabilitas telah berjalan dengan optimal. Penelitian oleh Ainun Zakiyah dan Abdul Sadad yang berjudul *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru* (Zakiyah & Sadad, 2023) menemukan bahwa Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru masih kurang baik. Penelitian oleh Munawarah, Nuraisyah Ambo, dan Ani Susanti yang berjudul *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah* menemukan bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sudah berjalan dengan baik (Munawarah, Ambo, & Susanti, 2024). Penelitian oleh Heru Sapto Priono yang berjudul *Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman* menemukan bahwa kinerja pegawai Satpol PP dalam memberikan rasa aman dan nyaman masyarakat di Kabupaten Sleman masih perlu ditingkatkan (Priono, 2023). Penelitian oleh Darmawati Manda, dkk. yang berjudul *Kinerja Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Takalar* menemukan bahwa Rata-rata mengenai kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Takalar sebesar 80,33 dengan persentase 67% (Manda, Alfian, Baharuddin, Supiati, & Hafidah, 2020). Penelitian oleh Rabudin Ramli, Afni, dan Muhtarom yang berjudul *Kinerja Organisasi Publik Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Gayo Lues* menemukan bahwa kinerja Dinas Satpol PP dan WH Kabupaten Gayo Lues belum optimal, terlihat dari beberapa aspek seperti akuntabilitas, responsibilitas, dan responsivitas (Ramli, Afni, & Muhtarom, 2024). Penelitian oleh Gusti Muhammad Roeis, Holten Sion, Syamsuri, dan Basrowi yang berjudul *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengawasan Pedagang Kaki Lima di Taman Kota Manis Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat* menemukan bahwa Faktor yang paling utama yang mempengaruhi kinerja Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pengawasan pedagang kaki lima di taman kota manis Pangkalan Bun dibagi menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi: efektif dan efisien, disiplin, inisiatif dan sumber daya manusia (Roes, Sion, Syamsuri, & Basrowi, 2023).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melaksanakan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, karena penelitian yang dilakukan sebelumnya membahas tentang Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagai organisasi sedangkan dalam Penelitian ini, Peneliti memfokuskan pembahasan pada Kinerja Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang merupakan salah satu fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori Kinerja menurut Mangkunegara (2017:75). Selain teori, rumusan masalah yang diangkat juga memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penulis menghubungkan penelitian dengan teori dari pemerintahan dan manajemen pemerintahan yang merupakan sesuai dengan tema fakultas.

1.5. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah Mengetahui dan menganalisis kinerja Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja Dalam Pelaksanaan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau; Mengetahui dan menganalisis Faktor penghambat kinerja Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja Dalam Pelaksanaan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau; dan Mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi faktor penghambat kinerja Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja Dalam Pelaksanaan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sumber data, memberi nilai pada kualitas data, analisis terhadap data, menafsirkan data yang ada serta membuat kesimpulan atas temuan dalam penelitian (Sugiyono, 2017). Metode kualitatif deskriptif digunakan penulis karena langsung terjun ke lapangan sehingga di rasa lebih tepat. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kota Tanjungpinang. Diharapkan juga melalui pendekatan ini dapat menjelaskan serta mengungkapkan kondisi aktual tentang kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat oleh pejabat fungsional polisi pamong praja di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang. Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini ada 7 orang yang diambil dari Pimpinan dan Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis menggunakan teori Kinerja menurut Mangkunegara (2017:75). Teori ini didukung dengan empat variable yang menjadi pusat perhatian yaitu Kualitas Kerja, Kuantitas Kerja, Pelaksanaan Tugas, dan Tanggung Jawab (Mangkunegara, 2017). Penulis menghubungkan teori tersebut dengan peraturan-peraturan yang memiliki hubungan terhadap permasalahan yang diteliti. Penyajian subbab juga disusun berdasarkan rumusan masalah yang ada pada penelitian.

3.1. Kualitas Kerja

Kualitas kerja adalah mutu pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh setiap Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja Di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang. Wujudnya dapat berbentuk keterampilan yang dimiliki sudah sesuai dan siap dalam memberikan pelayanan darurat. Dalam hal ini kualitas kerja yang difokuskan adalah kinerja keterampilan dari tiap-tiap anggota regu patroli. Kinerja pegawai telah disesuaikan dengan mutu standarisasi kerja berdasarkan elemen analisis untuk jabatan fungsional dimana untuk jabatan fungsional umumnya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian pencapaian kualitas kinerja pegawai diupayakan dengan meningkatkan sumber daya manusia dengan melakukan standarisasi kualitas kerja sesuai dengan mengintegrasikan unsur-unsur analisis struktural dan fungsional sehingga dapat dilakukan persis seperti pelaksanaan tugas utama yaitu menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menegakkan peraturan daerah. Penilaian kualitas kinerja pegawai menunjukkan kesiapan dalam memberikan pelayanan dan telah dilaksanakan dengan baik yang dimiliki Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja Di Satuan Polisi Pamong

Praja Kota Tanjungpinang.

3.2. Kuantitas Kerja

Kuantitas kerja merupakan akumulasi pekerjaan yang diselesaikan oleh setiap pegawai di suatu instansi atau organisasi. Wujud dari jumlah pekerjaan yang dihasilkan dari tingkat kinerja pegawai yang ada. Sebagai pegawai yang memiliki tugas dan kewajiban dalam melakukan memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja harus selalu siap siaga untuk melakukan aksi tindak lanjut atas laporan yang diterima agar masyarakat dapat terbantu dalam mengatasi gangguan tibumtranmas ataupun permasalahan lainnya. Kuantitas kinerja pegawai menunjukkan bahwa Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja telah melakukan tugasnya dengan siap siaga guna melakukan berbagai jenis kegiatan terutama patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

3.3. Pelaksanaan Tugas

Pelaksanaan tugas ialah seberapa jauh seorang pegawai mampu melakukan pekerjaan dengan akurat dan tidak ada kesalahan. Pelaksanaan adalah salah satu kegiatan yang dapat dijumpai dalam proses administrasi. Pelaksanaan tugas itu sendiri berisi dari kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh suatu instansi atau organisasi agar teratur, terarah, dan terencana agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja Di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang telah mampu dan melakukan pekerjaan mereka khususnya berkaitan dengan pelaksanaan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Mereka juga dianggap mampu dalam mengurangi resiko dalam pekerjaan sehingga dapat menekan tingkat kerugian yang ada. Disamping kemampuan dalam melakukan tugas dalam pelaksanaan patroli, pejabat fungsional polisi pamong praja juga harus dapat melayani masyarakat. Oleh karena itu Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja Di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang juga harus memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas pelayanan terhadap masyarakat. dalam memikul sebuah tugas setiap orang harus memahami tugas yang mereka emban. Dalam menerima segala bentuk pelaporan atau masukan aspirasi masyarakat setiap pejabat fungsional polisi pamong praja harus mampu menggunakan segala kemampuan yang dimiliki dalam menjalankan tugas yang ada, mulai dari kegiatan aktivitas operasional statis sampai dengan penggunaan sarana komunikasi untuk mempermudah proses kelancaran pekerjaan. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang menunjukan bahwa pejabat fungsional polisi pamong praja telah dapat memahami dan melaksanakan tugasnya sehingga dapat mengurangi tingkat gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kota Tanjungpinang.

3.4. Tanggung Jawab

Tanggung Jawab terhadap pekerjaan adalah kesadaran akan kewajiban pegawai untuk melaksanakan pekerjaan yang di berikan oleh suatu organisasi. Artinya, ketika seorang atau pegawai memiliki tanggung jawab untuk melakukan sesuatu, tetapi jika tidak melakukannya atau pada kenyataannya hasil dari pekerjaan tersebut tidak sesuai, maka akan mendapatkan konsekuensi. Dalam dunia kerja, tanggung jawab dapat membantu seseorang untuk memiliki komitmen dalam pekerjaannya dan menyelesaikan sesuai yang diharapkan. Tanggung jawab ini menjadi sangat penting bagi Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja Di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang dikarenakan tugas mereka sendiri berkaitan dengan khalayak banyak pada hal ini adalah menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Jika tidak sesuai dengan standar atau peraturan yang ada maka dapat menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Efisiensi kerja para pegawai dapat dilihat dari kualitas pekerjaan, menunjukkan bahwa perlu disesuaikan dari segi kualitas dan standarisasi pekerjaan dalam pelaksanaan Patroli Siaga

Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat, di mana Standar Kualitas adalah yang utama. *Template* yang harus dipahami dan diketahui pegawai saat ini untuk jabatan fungsional harus mengetahui kategori analitik berdasarkan persyaratan dan kualifikasi umum, khusus, dan untuk kategori struktural termasuk sekretaris, kepala seksi dan para anggotanya. Masyarakat telah mengetahui bahwa kinerja pegawai sudah sejalan dengan kinerja yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menegakkan perda. Pelaksanaan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat oleh Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja Di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan tupoksi Satpol PP memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Sama halnya dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tugas Polisi Pamong Praja dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penulis membawa sebuah kebaruan karena berfokus pada Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja saja.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (Opsional)

Penulis menemukan bahwa komposisi Sumber Daya Manusia di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang belum seimbang. Jumlah Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja masih kurang, namun terjadi penumpukan pada Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja Golongan III.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang dapat ditarik kesimpulan bahwa Kinerja Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja dalam Pelaksanaan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang dapat dinilai berdasarkan pencapaian hasil kerja secara kualitas, kuantitas, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kerja. Sejauh ini kualitas dari pejabat fungsional polisi pamong praja sudah sesuai dengan aturan dan menunjukkan kesiapan dalam memberi pelayanan. Kemudian para pejabat fungsional polisi pamong praja juga sudah melaksanakan tugasnya dengan siap siaga. Dalam pelaksanaan tugas, para pejabat fungsional polisi pamong praja sudah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan laporan yang diterima. Dan para pejabat fungsional polisi pamong praja bertanggung jawab akan pekerjaannya sesuai dengan aturan dalam melaksanakan tugas. Harus adanya pemeriksaan juga pemeliharaan peralatan sarana dan prasana patroli, hal ini bertujuan agar tetap terjaga untuk menunjang kinerja regu patroli dapat bekerja dengan maksimal. Selain itu juga, meningkatkan pengetahuan serta keterampilan pejabat fungsional polisi pamong praja karena masih terdapat pegawai-pegawai yang belum memahami secara dalam dan menyeluruh tentang tugasnya. Serta dapat memaksimalkan peralatan sarana prasarana sehingga dalam pelayanan kepada masyarakat dapat lebih optimal

Keterbatasan Penelitian: Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan utama yaitu pada keterbatasan waktu yang dimiliki oleh penulis dalam melaksanakan penelitian sehingga data dan informasi yang terkumpul masih belum bisa melengkapi keseluruhan dari aspek penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian: Penulis mengharapkan untuk penelitian kedepannya yang mengambil permasalahan yang sama dan tempat yang sama agar melakukan penelitian secara mendalam dan menyeluruh di semua aspek yang terkait di Kota Tanjungpinang, karena penulis menyadari dari hasil temuan penelitian ini yang masih tergolong awal.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis ucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing serta Dosen Penelaah yang telah mengambil andil untuk memberikan saran dan masukan dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih kepada

seluruh informan penelitian yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penulis selama pelaksanaan wawancara, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan pelaksanaan penelitian. Terima kasih.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, M. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Bumi Aksara.
- Lina, L., Hidayat, R., & Chandrawati, T. (2023). Kinerja Satpol PP dalam Tugas dan Fungsi Sebagai Penegak Peraturan Daerah di Kabupaten Tana Tidung. *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 520-528. doi:<https://doi.org/10.52423/neoresjurnal.v4i2.98>
- Manda, D., Alfian, R., Baharuddin, A., Supiati, & Hafidah, A. (2020). Kinerja Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Takalar. *Ampera : Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*, 5(2), 49-54. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Supiati-Supiati-2/publication/375559245_Kinerja_aparat_Satuan_Polisi_Pamong_Praja_Kabupaten_Takalar_The_performance_of_the_Takalar_Regency_Civil_Service_Police_Unit_Universitas_Negeri_Makassar_3/links/654f61e5b1398a779
- Mangkunegara, A. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moehersono. (2012). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Munawarah, Ambo, N., & Susanti, A. (2024). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Ilmiah Megalitik*, 1(1), 16-31. Retrieved from <https://yafatajournal.or.id/index.php/JIM/article/view/3/6>
- Pasang, N., Fatmawada, Irawan, H., & Dahlan. (2024). Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima. *El-Mujtama : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 1819-1829. doi:<https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i4.2167>
- Priono, H. S. (2023). Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman. *Jurnal Enersia Publika*, 7(2), 165-177. doi:<https://doi.org/10.30588/jep.v7i2.1747>
- Ramli, R., Afni, & Muhtarom. (2024). Kinerja Organisasi Publik Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Gayo Lues. *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(1), 258-264. doi:<https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i1.14849>
- Roies, G. M., Sion, H., Syamsuri, & Basrowi. (2023). KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENGAWASAN PEDAGANG KAKI LIMA DI TAMAN KOTA MANIS PANGKALAN BUN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT. *Cendekia : Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 17(1), 189-204. doi:<https://doi.org/10.30957/cendekia.v17i1.819>
- Septian, D., Zahran, W. S., & Utami, R. A. (2023). Analisis Kinerja Anggota Satpol PP Kota Bekasi Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Bekasi. *Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 10(1), 29-35. doi:<https://doi.org/10.31334/reformasi.v10i1.3282>
- Soedarmayanti. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Yulia, Rachmawati, I., & Mulyadi, A. (2019). Kinerja Satpol PP dalam Upaya Mewujudkan Ketertiban Umum di Kota Sukabumi. *JOPPAS : Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 1(1), 19-29. doi:<https://doi.org/10.31539/joppa.v1i1.802>

Zakiah, A., & Sadad, A. (2023). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru. 6(1), 195-206. Retrieved from <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/1777/1350>

